

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/11/I/KA/IR.01.02/2024/BNNP

TENTANG

TIM KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONALPROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- : a. bahwa rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam membangun Zona Integritas di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggra Barat.
 - b. bahwa untuk pelaksanaannya maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 - 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - 8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - 11. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

/ MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara

Barat Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Tim Kerja Penyelenggaraan SPIP sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kerja (action plan) tahun 2024/2025 dalam rangka penyelenggarann SPIP dilingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi

Nusa Tenggara Barat;

b. Menyiapkan berbagai instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja tersebut sesuai pada butir a;

c. Mengadministrasi dan melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Uraian tugas untuk setiap unsur Tim Kerja Penyelenggaraan SPIP adalah

sebagaimana tercantum pada Lampiran-II keputusan ini;.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Kerja Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) terhitung sejak keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan Keputusan

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

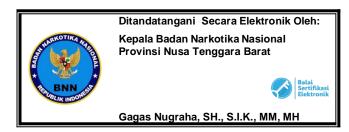
1. Kepala BNN

- 2. Sekretaris Utama BNN
- 3. Inspektur Utama BNN
- 4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN
- 5. Para Kepala BNN Kab/Kota Dilingkungan BNN Provinsi NTB
- 6. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2024





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TEGGARA BARAT

NOMOR : KEP/ 11 /I/KA/IR.01.02/2024/BNNP TANGGAL : 02 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM KERJA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2024

1. Penanggung Jawab : Gagas Nugraha, SH, S.I.K, MM, MH

2. Ketua : M. Ridwan, S.AP

3. Wakil Ketua : Yoel Agus Wicaksono, S.Psi

4. Sekretaris : Ratna Noerbani, A.Md

5. Tenaga Sekretariat : 1. Wahida Purnamasari, S.Kom

2. Adi Setyo Prabowo S, S.Psi

3. Soviarini Agustina, S.E.

4. Muhammad Haryadi, A.Md

5. Irmawati, A.Md

6. Anggota : 1. Kabid Pemberantasan dan Intelijen

2. Koordinator Bidang P2M

3. Koordinator Bidang Rehabilitasi

4. Kepala BNN Kota Mataram

5. Kepala BNN Kab. Sumbawa

Kepala BNN Kab. Sumbawa Barat

7. Kepala BNN Kab. Bima

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal : 02 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NUSA TEGGARA BARAT

NOMOR : KEP/ 11 /I/KA/IR.01.02/2024/BNNP TANGGAL : 02 JANUARI 2024

URAIAN TUGAS TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

1. Penanggung Jawab bertugas:

- a. Menetapkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP.
- b. Menetapkan ilnstrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP.
- c. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP.
- d. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas Tim SPIP.

2. Ketua Tim bertugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja penyelenggaraan SPIP.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP.
- c. Mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas Tim SPIP.
- d. Melaporkan secara berkala kepada Inspektorat Utama BNN.

3. Sekretaris Tim bertugas:

- a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Tim SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
- b. Membantu Ketua Tim dalam koordinasi penyusunan rencana kerja.
- c. Membantu Ketua Tim dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP.
- d. Membantu Ketua Tim dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan SPIP.

4. Anggota Tim bertugas:

- a. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan Bidang/Bagian masing-masing.
- b. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai bidang/bagian masing-masing.
- c. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan SPIP.
- d. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di bagian masing-masing.

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 02 Januari 2024



